

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dalam memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian.

Pada bagian ini peneliti mencantumkan berbagai hasil penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan (skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya). Dengan melakukan langkah ini, maka akan dapat dilihat sejauh mana orisinalitas dan posisi penelitian yang hendak dilakukan. Kajian yang mempunyai relasi atau keterkaitan dengan kajian ini antara lain:

1. Wirdanto yang berjudul *Peran Komite Sekolah Dalam Mengembangkan Lembaga Pendidikan tahun 2012/2013*.¹⁵ Yang mendeskripsikan pelaksanaan komite sebagai pertimbangan (*advisory agency*) dalam pengembangan lembaga terkait dengan kinerja pertimbangan terhadap rencana anggaran pendapat dan belanja sekolah (RAPBS) dilibatkan dalam pemberi pertimbangan meskipun hal tersebut masih ada ketidak transparansi dari pihak madrasah itu sendiri.
2. Ida Tasrika yang berjudul *Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Antara Madrasah Dengan Masyarakat Di Madrasah*

¹⁵ Wirdanto. *Peran komite sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan*, (Skripsi, Fakultas Tarbiyah STAIN Jember, 2012)

*Ibtidaiyah Negeri Tanggul Tahun 2010/2011.*¹⁶ Yang membicarakan bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan kerja sama madrasah dan masyarakat saja tidak berkaitan dengan mutu pendidikan di madrasah ibtidaiyah tanggul dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di madrasah ibtidaiyah negeri tanggul tahun pelajaran 2010/2011 peran komite sekolah dalam peningkatan hubungan kerja sama antara madrasah dengan masyarakatnya telah terealisasi secara maksimal.

3. **Hendra Ahmad Barizi** yang berjudul *peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah Tsanawiyah Al-hidayah desa bondoyodo kecamatan sukodono kabupaten lumajang tahun pelajaran 2014/2015.*¹⁷ Yang membicarakan tentang peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa saja tidak berkaitan dengan dengan mutu pendidikan di MTS Al-hidayah dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan menggunakan tehnik observasi, wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang penulis dapatkan di madrasah tsanawiyah al-hidayah bondoyodo tahun ajaran 2014/2015 peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa telah terealisasi secara maksimal.

Tabel. 2.1

¹⁶ Ida, Tasrika. Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Antara Madrasah dengan Masyarakat di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanggul tahun ajaran 2010/2011, (skripsi, fakultas tarbiyah STAIN jember, 2010)

¹⁷ Farizi, hendra ahmad, peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di madrasah tsanawiyah al-hidayah desa bondoyodo kecamatan sukodono lumajang tahun ajaran 2014/2015(skripsi, fakultas tarbiyah IAIN jember, 2014)

Persamaan dan perbedaan penelitian

No	Nama	Skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Wirdanto	<i>Peran komite sekolah dalam mengembangkan lembaga pendidikan tahun ajaran 2012/2013.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan penelitian kualitatif ➤ Membahas peran komite sekolah 	Mengembangkan lembaga pendidikan sedangkan penelitian yang sekarang lebih kepada meningkatkan mutu pendidikan
2	Ida kartika	<i>Peranan Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Hubungan Kerja Sama Antara Madrasah Dengan Masyarakat Di Madrasah Ibtidaiyah Negeri Tanggul Tahun 2010/2011.</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan penelitian kualitatif ➤ Membahas peran komite sekolah 	Pembahasan, fokus dan tujuan penelitian
3	Hendra Ahmad Barizi	<i>peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa di Madrasah</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Menggunakan penelitian kualitatif ➤ Membahas peran komite sekolah 	Penelitian terdahulu hanya membahas meningkatkan prestasi belajar sedangkan penelitian sekarang fokus terhadap

		<p><i>Tsanawiyah Al-hidayah desa bondoyodo kecamatan sukodono kabupaten lumajang tahun pelajaran 2014/2015.</i></p>	<p>peningkatan mutu pendidikan</p>
--	--	---	------------------------------------

Dari ketiga penelitian tersebut dapat diketahui beberapa persamaan dan perbedaan antara penelitian yang dilakukan dengan 3 penelitian tersebut. Persamaan dan perbedaan dapat diketahui sebagai berikut:

a. Persamaan

Persamaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas peran komite sekolah.

Persamaan penelitian kedua dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang peran komite sekolah.

Persamaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu sama-sama meneliti bagaimana peran komite sekolah .

b. Perbedaan

Perbedaan penelitian pertama dengan penelitian ini yaitu perbedaan dari segi pembahasan, penelitian tersebut lebih difokuskan pada manajemen hubungan masyarakat dalam mengembangkan lembaga pendidikan dan sedangkan penelitian ini lebih difokuskan dengan peran komite sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan.

Perbedaan penelitian kedua dengan penelitian ini membicarakan bagaimana peran komite sekolah dalam meningkatkan hubungan kerja sama madrasah dan masyarakat saja tidak berkaitan dengan mutu pendidikan

Perbedaan penelitian ketiga dengan penelitian ini yaitu penelitian tersebut menfokuskan penelitian pada peran komite sekolah dalam meningkatkan prestasi belajar siswa . Dan penelitian ini memfokuskan pada prestasi belajar siswa.

B. Kajian Teori

1. Komite Sekolah

a. Pengertian Komite Sekolah

Dalam pasal 1 ayat (2) keputusan menteri tersebut dinyatakan, pada setiap satuan pendidikan atau kelompok satuan pendidikan dibentuk komite sekolah, atas prakarsa masyarakat, satuan pendidikan, dan/atau pemerintah kabupaten/kota. Komite sekolah sendiri dalam keputusan menteri didefinisikan sebagai badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi dalam pengelolaan pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah.¹⁸

Dalam undang-undang sisdiknas (2003) dikemukakan bahwa komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali murid, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat, dan berfungsi memberikan pertimbangan tentang manajemen sekolah. Selain itu, dikemukakan bahwa dewan pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur

¹⁸ Kadi, *Otonomi Pendidikan Di Era Otonomi Daerah*, , 39.

masyarakat dan berfungsi memberikan pertimbangan dalam rangka memberdayakan dan menjamin kualitas pendidikan ditingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota. Keberadaan kedua lembaga tersebut (komite sekolah dan dewan pendidikan) merupakan prasyarat mutlak bagi implementasi manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, untuk menciptakan sekolah yang mandiri, efektif, efisien, produktif dan akuntabel; kepala sekolah dituntut untuk menggandeng komite sekolah dan dewan pendidikan.¹⁹

b. Peran Komite Sekolah

1) Pertimbangan (*Advisory Agency*)

Peran sebagai pemberi pertimbangan atau nasihat menunjukkan respon dan keikutsertaan dewan pendidikan dan komite sekolah memajukan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan di daerah dan di sekolah. Bentuk aktifitas dewan pendidikan dan komite sekolah antara lain: (1) memberi pertimbangan mengenai program dan kegiatan yang disusun dalam rencana pembangunan pendidikan tingkat kabupaten/kota, (2) memberikan pertimbangan buat guru dalam pelaksanaan tugas supaya tidak sewenang-wenang dalam menangani siswa (misalnya dalam member hukuman tetapi juga member penghargaan bagi yang berprestasi), (3) memberi pertimbangan dalam meningkatkan disiplin guru dan memberi solusi bagi kesulitan-kesulitan yang dihadapi

¹⁹ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, (Jakarta: PT bumi aksara, 2012), 126

guru, (4) memberi pertimbangan dalam mengembangkan bakat dan minat siswa (seperti olimpiade mata pelajaran, seni, dan olahraga).²⁰

Disamping itu pemerintah daerah harus dapat menangkap aspirasi dan keinginan rakyat di daerahnya. Untuk ini, dengan pendidikan secara normal memang harus dapat memberikan bahan masukan dan pertimbangan pada bupati/wali kota. Untuk dapat memberikan masukan dan pertimbangan ini, komite sekolah justru harus dapat menjalin komunikasi secara informal untuk membuka jalan hubungan dan kerjasama kemitraan dengan dewan pendidikan dengan pemerintah daerah.²¹

2) Pendukung (*Supporting Agency*)

Peran aktif komite sekolah diperlukan untuk memberikan dukungan atas kelancaran manajemen sekolah dan memenuhi kebutuhan sekolah meningkatkan kualitas layanan belajar.²²

Komite sekolah dapat mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan. Dalam peran ini aktifitas operasional komite sekolah adalah: (1) mengadakan rapat atau pertemuan secara berkala dengan orang tua siswa dan masyarakat, (2) mencari bantuan dana dari dunia usaha dan industry untuk biaya pembebasan uang sekolah bagi siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu, (3) mengadakan pendekatan kepada masyarakat dan orang tua siswa yang dipandang

²⁰ Mulyasa, *Menjadi kepala sekolah profesional*, (Bandung: pt remaja posdakarya, 2006) , 189.

²¹ Sagala Syaiful, *kemampuan profesional guru dan tenaga kependidikan*, (Bandung : Alfabeta, 2009), 256.

²² Sagala Syaiful, *manajemen strategis dalam peningkatan mutu pendidikan*, (Bandung: Alfabeta), 245.

mampu untuk menjadi narasumber dalam kegiatan intrakurikuler bagi peserta didik disekolah, (4) member dukungan-dukungan kepada sekolah untuk pemeriksaan kesehatan siswa, (5) memberi dukungan kepada sekolah untuk pemeriksaan kesehatan sekolah, (6) member dukungan kepada sekolah dalam bentuk dana untuk kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.

Bentuk peran komite sekolah/madrasah sebagai pendukung sekolah, juga diwujudkan dengan menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan pendidikan disekolah. Selain itu juga diwujudkan dengan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu di sekolah.

3) Pengontrol (*Controlling Agency*)

Sesuai peran dewan pendidikan dan komite sekolah sebagai badan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan sekolah, termasuk pelaksanaan dan penggunaan rencana kegiatan sekolah (RKS) dan rencana kegiatan tahunan (RKT). Fungsi pengontrol (*controlling agency*) menunjukkan bahwa dewan pendidikan dan komite sekolah melakukan aktivitas, yaitu :

- (1) Menanyakan proses belajar mengajar (keguru dan kepala sekolah) apakah sudah mengarah pada standar yang dipersyaratkan.
- (2) Menanyakan kondisi kesehatan, gizi dan bakat para peserta didik.
- (3) Memantau rencana kegiatan sekolah dan rencana kegiatan tahunan.
- (4) Ikut serta dalam penyusunan RKS dan RKT.
- (5) Ikut memantau penggunaan anggaran yang bersumber dari BOS.

- (6) Ikut serta dalam rapat dalam pembagian rapor.
- (7) Mengontrol kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan lainnya.
- (8) Mengontrol pelaksanaan PBM dengan memakai kartu data sesuai dengan perlindungan anak.

Peran pengontrol (*controlling agency*) unruk menjamin tiga persyaratan manajemen modern yang sehat, yakni demokratis, transparan dan akuntabel dapat terjaga dan diimplementasikan secara konsisten. Demokratis maksudnya dalam penyusunan RKS/RKT harus melibatkan unsure yang terkait. Tranparan artinya pelaksanaan RKS/RKT tidak ditutup-tutupi karena adanya tujuan atau maksud tertentu yang tidakbertanggung jawab. Semua unsure yang terkait dapat secara terbuka melihat dan memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan RKS/RKT. Akuntabel artinya pelaksanaan RKS/RKT tersebut dilaporkan secara tertulis kepada semua stake holder pendidikan. Makanya tahap akhir pelaksanaan RKS/RKT adalah penyusunan laporan pertanggung jawaban kepada semua pihak yang terkait. Sesuai dengan bidangnya komite sekolah bersama DPRD juga dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan dalam bidang pendidikan di daerah dan di tingkat satuan pendidikan.²³

4) Penengah (*Mediating Agency*)

Pusat pendidikan yaitu keluarga, sekolah, dan masyarakat harus saling kerjasama secara sinergis untuk peningkatan mutu pendidikan.

²³ Sagala Syaiful, *kemampuan profesioanl guru dan tenaga kependidikan* (bandung: Alfabeta, 2009), 259

Untuk dapat dapat kerjasama secara sinergis harus ada yang menghubungkan antara keluarga, sekolah, dan masyarakat. Itulah sebabnya salah satu peran komite sekolah adalah peran penghubung/penengah. Jika da kerjasama yang baik antara keluarga, sekolah, dan masyarakat, maka beberapa dari banyak program yang inovatif dapat dicoba untuk dilaksanakan oleh sekolah. Peran penghubung menunjukkan bahwa komite sekolah bahwa, (1) menghubungkan dengan instansi pemerintah, (2) menghubungi orang tua siswa yang mampu untuk meminta kesediannya menjadi donator atau bantuan lainnya yang disetujuinya untuk keperluan sekolah (dengan menjelaskan program kerja yang akan dilaksanakan oleh sekolah), (3) mencari informasi yang bias dipakai oleh sekolah untuk mengembangkan sekolah, (4) member laporan kepada masyarakat tentang penggunaan keuangan dan pelaksanaan program.

Ke-empat fungsi komite tersebut dapat melakukan aktifitas bukanlah melakukan fungsinya secara terpisah-pisah, tetapi berlangsung secara simultsn. Dalam melakukan aktivitasnya, mereka mengedepankan peningkatan kualitas pendidikan, bukan menyalurkan kehendaknya pribadi apalagi melakukan pemerasan. Dalam melaksanakan fungsinya dilakukan secara seimbang dengan memperhatikan etika dan aturan yang berlaku serta focus pada perolehan mutu yang kompetitis.²⁴

2. Fungsi Komite Sekolah

²⁴ Sagala Syaiful, *kemampuan profesioanl guru dan tenaga kependidikan*(bandung: alfabeta, 2009), 260

Tugas komite sekolah menganut model kemitraan yaitu coordinator dan fasilitator. Oleh karena itu fungsi komite sekolah sangat dominan bagi tercapainya tujuan pendidikan, karena dapat menawarkan pendidikan yang lebih baik dengan menjadikan sekolah unggulan dan berorientasi budaya daerah.

Sebagaimana dikemukakan satori bahwa tugas dan fungsi komite sekolah antara lain: menetapkan AD dan ART komite sekolah, menentukan dan membantu kesejahteraan personal, mengkaji kinerja sekolah dan melakukan internal auditing.²⁵

Menurut Kadi fungsi yang harus dijalankan oleh komite sekolah adalah sebagai berikut:

- a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu
- b) Melakukan kerja sama dengan masyarakat dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.
- c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.
- d) Memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai: kebijakan dan program pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), criteria kinerja satuan pendidikan, criteria tenaga kependidikan, criteria fasilitas pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan, mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu serta pemerataan

²⁵ Sagala, 2009, Manajemen strategic dalam peningkatan mutu pendidikan(bandung: alfabeta, 2009), 245.

pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

- e) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan.²⁶

Selain yang di atas Mulyasa mengemukakan fungsi Komite Sekolah antara lain sebagai berikut:²⁷

- a) Mendorong orang tua dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan guna mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan
- b) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan di sekolah.

3. Tujuan dan Pembentukan Komite Sekolah

Tujuan pembentukan Komite Sekolah sebagaimana tertuang dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional adalah:

- a) Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan.
- b) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dan penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.
- c) Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

²⁶ Ade Irawan, dkk, *Studi kebijakan manajemen berbasis sekolah* (Jakarta Indonesian corruption watch, 2004), 37-44.

²⁷ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah* (Jakarta: bumi aksara, 2012), 129

Adapun komposisi keanggotaan komite sekolah sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional tersebut terdiri atas:

- a) Unsur masyarakat yang berasal dari: orang tua/wali murid, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, dunia usaha /industri, organisasi profesi tenaga kependidikan, wakil alumni, wakil peserta didik.
- b) Unsur dewan guru, yayasan/lembaga penyelenggaraan pendidikan, badan pertimbangan desa (maksimal 3 orang).²⁸
- c) Anggota komite sekolah, sekurang-kurangnya berjumlah 9 (sembilan) orang, dan jumlahnya gasal.

Adapun kepengurusan komite sekolah antara lain:

- a) Pengurus sekurang-kurangnya terdiri atas: ketua, sekretaris, bendahara.
- b) Pengurus dipilih dari dan oleh anggota
- c) Ketua bukan berasal dari kepala sekolah

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) komite sekolah antara lain ialah sebagai berikut:²⁹

- a) Komite sekolah wajib memiliki AD dan ART
- b) Anggaran Dasar sebagaimana yang dimaksud, sekurang-kurangnya memuat: Nama dan tempat kedudukan; Dasar, tujuan dan kegiatan; keanggotaan dan kepengurusan; Hak dan Kewajiban Anggota dan pengurus; keuangan; mekanisme kerja dan rapat-rapat; perubahan AD dan ART, serta pembubaran organisasi.

²⁸ Kadi. 2009. *Otonomi pendidikan di era otonomi daerah* (ponorogo: stain pro press), 40.

²⁹ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah* (Jakarta: bumi aksara 2012), 130

Pembentukan komite sekolah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut: a) transparan, akuntabel, dan demokratis, b) merupakan mitra sekolah. Sedangkan mekanisme pembentukan terdiri dari:

a) Pembentukan panitia persiapan

1) Masyarakat dan sekolah membentuk panitia persiapan. Panitia persiapan berjumlah, sekurang-kurangnya 5 (lima) orang, yang terdiri atas kalangan praktisi pendidikan (seperti guru, kepala sekolah, penyelenggara pendidikan), pemerhati pendidikan (LSM peduli pendidikan, tokoh masyarakat, tokoh agama, dunia usaha dan industri), dan orang tua peserta didik.

2) Panitia persiapan bertugas mempersiapkan pembentuk komite sekolah dengan langkah-langkah sebagai berikut:

(a) Mengadakan forum sosialisasi kepada masyarakat (termasuk pengurus/anggota BP3, komite sekolah, dan komite sekolah yang sudah ada) tentang komite sekolah menurut keputusan ini.

(b) Menyusun kriteria dan mengidentifikasi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat.

(c) Menyeleksi calon anggota berdasarkan usulan dari masyarakat

(d) Mengumumkan nama-nama calon anggota kepada masyarakat

(e) Menyusun nama-nama anggota terpilih

(f) Memfasilitasi pemilihan pengurus dan anggota komite sekolah

(g) Menyampaikan nama pengurus dan anggota komite sekolah kepada kepala sekolah

- 3) Panitia persiapan dinyatakan bubar setelah komite sekolah terbentuk
- 4) Penetapan pembentukan komite sekolah

Komite sekolah di tetapkan untuk pertama kali dengan surat keputusan kepala sekolah, dan selanjutnya diatur di dalam AD dan ART.

4. Peningkatan Mutu Pendidikan

a. Pengertian Mutu Pendidikan

Pengertian mutu memiliki variasi sebagaimana didefinisikan oleh masing-masing orang atau pihak. Produsen (penyedia barang atau jasa) atau konsumen (pengguna/pemakai barang atau jasa) akan memiliki definisi yang berbeda mengenai mutu barang atau jasa. Perbedaan ini mengacu pada orientasi masing-masing pihak mengenai barang/jasayang menjadi objeknya. Satu kata yang menjadi benang merah dalam konsep mutu baik menurut konsumen maupun produsen adalah kepuasan. Barang atau jasa yang dikatakan bermutu adalah yang dapat memberikan kepuasan baik bagi pelanggan maupun produsennya.³⁰

Sagala mengemukakan bahwa Mutu berkenaan dengan penilaian bagaimana suatu produk memenuhi criteria, standar atau rujukan tertentu. Dalam dunia pendidikan, standar ini menurut depdiknas dapat dirumuskan melalui hasil belajar mata pelajaran skolastik yang dapat diukur secara kuantitatif, dan pengamatan yang bersifat kualitatif, khususnya untuk bidang-bidang pendidikan social.³¹ Rumusan mutu pendidikan bersifat dinamis dan

³⁰ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, 2012, *manajemen pendidikan*. Bandung Alfabeta , 293.

³¹ Depdiknas. *Manajemen peningkatan mutu pendidikan berbasis sekolah*. Jakarta, 2.

dapat ditelaah dari berbagai sudut pandang. Kesepakatan tentang konsep mutu dikembalikan pada rumusan acuan atau rujukan yang ada seperti kebijakan pendidikan, proses belajar mengajar, kurikulum, sarana prasarana, fasilitas pembelajaran, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kesepakatan pihak-pihak yang berkepentingan.

Mutu pendidikan harus di upayakan untuk mencapai kemajuan yang dilandasi oleh suatu perubahan terencana. Peningkatan mutu pendidikan diperoleh melalui dua strategi, yaitu peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi akademis untuk member dasar minimal dalam perjalanan yang harus ditempuh mencapai mutu pendidikan yang dipersyaratkan oleh tuntutan zaman, dan peningkatan mutu pendidikan yang berorientasi pada keterampilan hidup yang esensial yang dicakupi oleh pendidikan yang berlandasan luas, nyata dan bermakna. Dalam kaitan dengan strategi yang akan ditempuh, peningkatan mutu pendidikan sangat terkait dengan relevansi pendidikan dan penilaian berdasarkan kondisi actual mutu pendidikan tersebut.

Mutu pendidikan tidak saja ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga pengajaran, tetapi juga disesuaikan dengan apa yang menjadi pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu berkembang seiring dengan kemajuan zaman. Bertitik tolak pada kecendrungan ini penilaian masyarakat tentang mutu lulusan sekolah pun terus menerus berkembang. Karena itu sekolah harus terus menerus meningkatkan mutu lulusannya dengan menyesuaikannya dengan perkembangan tuntutan masyarakat menuju pada mutu pendidikan yang dilandasi tolak ukur norma ideal.

Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh jasa pelayanan pendidikan secara internal maupun eksternal yang menunjukkan kemampuannya memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat mencakup input proses dan output.³²

Sekolah dapat dikatakan bermutu bermutu apabila prestasi sekolah khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi dalam (1) prestasi akademik yaitu nilai rapor dan nilai kelulusan memenuhi standar yang ditentukan, (2) memiliki nilai-nilai kejujuran, ketaqwaan, kesopanan dan mampu mengapresiasi nilai-nilai budaya, (3) memiliki tanggung jawab yang tinggi dan kemampuan yang diwujudkan dalam bentuk keterampilan sesuai dengan dasar ilmu yang diterimanya disekolah.

Lembaga pendidikan atau sekolah dikatakan bermutu apabila telah memenuhi lingkup standar Nasional Pendidikan meliputi: Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan Standar Penilaian Pendidikan.³³

Mutu pendidikan adalah kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma/standar yang berlaku.³⁴

³² Sagala, *Manajemen strategic dalam peningkatan mutu pendidikan* (Bandung: Alfabeta, 2009)170

³³ Ishana, Hanifah. *Himpunan lengkap undang-undang system pendidikan nasional*, (Jogjakarta: saufa, 2014) 93

³⁴ Imam, Gojali, *manajemen mutu sekolah*, (Jakarta: IRCiSoD, 2010) ,124.

Berdasarkan deskripsi dari beberapa pakar mengenai mutu pendidikan dapat disimpulkan bahwa mutu pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan akademis dan ekstrakurikuler pada peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau menyelesaikan program pembelajaran tertentu. Dilihat dari definisi ini maka mutu pendidikan bukanlah upaya sederhana, melainkan suatu kegiatan dinamis dan penuh tantangan. Pendidikan akan terus berubah seiring perkembangan zaman yang melingkarinya, sebab pendidikan merupakan buah dari zaman itu sendiri. Oleh karena itu, pendidikan senantiasa memerlukan upaya perbaikan dan peningkatan mutu sejalan dengan semakin tingginya kebutuhan dan tuntutan kehidupan masyarakat.

Adapun ukuran mutu menurut criteria mutu Baldrige berfokus pada 7 area topik yang secara integral dan dinamis Sali berhubungan, yaitu leadership, information dan analysis, strategic quality planning, human resource management, quality assurance.

b. Dimensi Mutu Pendidikan

Terdapat lima dimensi pokok yang menentukan kualitas penyelenggaraan pendidikan.³⁵

1) Keandalan (*reability*)

Yakni kemampuan memberikan pelayanan yang dijanjikan secara tepat waktu akurat dan memuaskan. Beberapa contoh diantaranya: pengembangan bahan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan (misalnya

³⁵ Mulyasa, *manajemen dan kepemimpinan kepala sekolah*, (Jakarta: bumi aksara, 2013) , 167-168.

tuntutan keterampilan profesi dan dunia kerja). Jadwal kegiatan pembelajaran dan ujian yang akurat, pembelajaran yang berlangsung lancar, bimbingan yang lancar dan tepat; kepastian studi lanjut kependidikan yang terencana dan terlaksana dengan baik; dana penelitian dan tenaga kependidikan, dan kegiatan peserta didik dapat dilakukan secara tepat waktu dan tepat sasaran sesuai dengan yang dijanjikan.

- 2) Daya tanggap (*responsiveness*)
- 3) Yaitu kemauan/kesediaan para staf untuk membantu peserta didik dan memberikan pelayanan cepat tanggap. Dengan demikian, kepala sekolah harus mudah ditemui; guru juga harus mudah ditemui peserta didik untuk keperluan konsultasi; proses pembelajaran hendaknya diupayakan interaktif dan memungkinkan peserta didik mengembangkan seluruh kapasitas, kreatifitas dan kapabilitasnya; fasilitas pelayanan yang ada (perpustakaan, computer, lab dan ruang olahraga) harus mudah diakses oleh setiap insan sekolah; prosedur administrasi penerimaan peserta didik baru harus sederhana tidak birokrasi atau berbelit-belit. Dalam hal ini terjadi salah pelayanan, kemampuan untuk melakukan perbaikan secara tepat dan professional bisa menciptakan persepsi kualitas yang sangat positif. Sebagai contoh, jika ada komputerr yang rusak di lab computer, harus segera diambil tindak lanjut, yaitu menginformasikan dan segera memperbaiki.
- 4) Jaminan (*assurance*)

Jaminan mencakup pengetahuan kompetensi, kesopanan, respek terhadap pelanggan dan sifat dapat dipercaya yang dimiliki para tenaga kependidikan; bebas dari bahaya, resiko atau keragu-raguan. Sebagai contoh seluruh tenaga kependidikan harus benar-benar kompeten dibidangnya; reputasi penyelenggaraan yang positif di mata masyarakat; sikap dan perilaku seluruh tenaga kependidikan mencerminkan profesionalisme dan kesopanan.



5) Empati

Empati meliputi kemudahan dalam melakukan hubungan, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan memahami para kebutuhan pelanggan. Misalnya, guru mengenal nama peserta didik yang menempuh mata pelajaran yang dia ajar; wali kelas bisa benar-benar sesuai fungsinya; setiap guru bisa dihubungi dengan mudah, baik ruang kerja via telepon, maupun e-mail.

6) Bukti langsung/fisik (*tangible*),

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 42 Bab VII Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan yang berisi sebagai berikut:

- a) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
- b) Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Selain yang disebutkan diatas Gojali juga merumuskan delapan dimensi mutu pendidikan antara lain sebagai berikut:

a) Kinerja/performa (*performance*)

Yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli suatu produk yakni karakteristik pokok dari produk inti.

b) Features

Merupakan aspek kedua dari dari performa yang menambah fungsi dasar serta berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya, yaitu cirri-ciri/keistimewaan tambahan atau karakteristik pelengkap/tambahan.

c) Keandalan (*reliability*)

Yaitu berkaitan dengan kemungkinan suatu produk yang berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu dibawah kondisi tertentu. Dengan demikian keandalan merupakan karakteristik yang merefleksikan kemungkinan tingkat keberhasilan dan penggunaan suatu produk.

d) Konformitas (*conformance*)

Yaitu berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. Kalau menurut Tjiptono, konformitas

berkaitan dengan sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi standar-standar yang telah ditetapkan sebelumnya.

e) Daya tahan (*durability*)

Yaitu berkaitan dengan berapa lama produk tersebut dapat terus digunakan.

f) Kemampuan pelayanan (*serviceability*)

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan/kesopanan, kompetensi, kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan.

g) Estetika (*aesthetics*)

Merupakan karakteristik mengenai keindahan yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual.

h) Kualitas yang dipersepsikan (*perceived quality*)

Yaitu karakteristik yang berkaitan dengan reputasi (*brand name, image*).³⁶

c. Teknik Peningkatan Mutu Pendidikan

Untuk mengaplikasikan manajemen peningkatan mutu ada empat teknik diantaranya sebagai berikut:³⁷

a) School Review

School review merupakan proses dimana semua komponen sekolah bekerja sama dengan orang tua siswa, tenaga profesional dan

³⁶ Imam, Gojali, *Manajemen mutu sekolah di era otonomi pendidikan*(Jogjakarta: IRCiSoD,2010) ,130-131.

³⁷ Winoto, suhadi, *Manajemen berbasis sekolah*,(Jember:Pena Salsabila 2011), 86-89.

pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan mutu sekolah, serta mutu lulusan. Dari pelaksanaan teknik school review diharapkan dapat diketahui : bagaimana prestasi siswa, apakah mutu sekolah sesuai dengan harapan orang tua siswa, factor apa saja yang menghambat peningkatan mutu siswa, dan factor apa saja yang mendukung peningkatan mutu. Jadi school review akan dapat menghasilkan rumusan tentang: kelemahan, kelebihan, prestasi sekolah, dan rekomendasi untuk penyusunan perencanaan strategis pengembangan sekolah tahun yang akan datang.

b) Bechmarking

Bechmarking adalah kegiatan untuk menetapkan standard an target. Baik proses maupun hasil yang akan dicapai oleh periode tertentu. Untuk kepentingan praktis maka standar tersebut direfleksikan dalam realitas yang ada. Sebagai contoh untuk perilaku mengajar bisa saja standar yang ditetapkan adalah dengan merefleksikan pada guru yang dikenal baik oleh siswa maupun guru yang lain, dan memiliki prestasi dalam mengajar. Demikian juga, dapat saja standar kualitas yang akan dicapai direfleksikan pada suatu sekolah. Jadi bechmarking dapat diaplikasikan dan direfleksikan pada individu, kelompok maupun lembaga.

Dalam buku panduan manajemen sekolah (Debdiknas 2000) disebutkan bahwa dalam teknik bechmarking akan dapat menjawab beberapa pertanyaan,(a) seberapa baik kondisi sekolah (b) standard an target apa yang akan dicapai (c) bagaimana untuk mencapai target dan standar baik tersebut. Sebagai langkah praktis untuk melaksanakan teknik

bechmarking dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut: menentukan focus, tentukan standard an indikatornya, bandingkan standard an indikatornya dengan kondisi sekolah, tentukan problem atau kesenjangan.

c) Quality Assurance

Quality assurance adalah suatu teknik untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, quality assurance bersifat proses oriended, artinya konsep ini mengandung suatu jaminan bahwa proses yang berlangsung telah berjalan sesuai dengan standar. Dengan demikian, diharapkan hasil yang dicapai memenuhi standar yang telah ditetapkan. Oleh sebab itu, agar proses berjalan sebagaimana yang telah ditetapkan, maka perlu diadakan audit dan monitoring terhadap semua komponen sekolah secara berkesinambungan. System audit, harus dilembagakan, sehingga subsistem sekolah.

Teknik quality assurance sangat bermanfaat bagi sekolah dan orang tua siswa. Bagi sekolah, teknik ini merupakan informasi umpan balik, sekaligus membantu sekolah dalam: menilai pelaksanaan dan hasil pendidikan, memperkuat akuntabilitas sekolah, dan menilai mutu lulusan siswa.

Untuk melaksanakan quality assurance disekolah, diharapkan:

- a. Menekankan pada kualitas hasil belajar
- b. Hasil kerja siswa dimonitor dan evaluasi secara terus menerus

- c. Informasi dan data dari sekolah, dikumpulkan dan dianalisis untuk memperbaiki proses pendidikan di sekolah
- d. Semua komponen sekolah, baik kepala sekolah, guru, tata usaha, pembantu pelkasana, dan orang tua siswa harus memiliki komitmen secara bersama-sama dalam mengevaluasi kondisi sekolah dan mengembangkannya secara lebih baik
- e. Pemantauan, penelitian, dan pelaporan hasil kerja siswa harus dilaksanakan secara terencana dan sistematis, dan
- f. Program-program pokok sekolah harus dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang terkait khususnya orang tua siswa.³⁸

d) Quality Control

Quality control yaitu, suatu system untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan. Jadi konsep ini berorientasi pada output, dengan tujuan untuk memastikan apakah mutu output sudah sesuai dengan standar atau tidak. Oleh sebab itu, teknik quality control memerlukan adanya indicator kualitas yang pasti dan jelas, sehingga dapat ditentukan penyimpangan-penyimpangan kualitas yang terjadi.

Selain empat teknik peningkatan mutu diatas, menurut Morgadroyd dan Morgan ada teknik mendasar dalam menetapkan mutu, yaitu:

³⁸ Imam, Gojali, *Manajemen mutu sekolah*, (Jogjakarta: IRCiSoD, 2010), 149.

- (1) *Quality assurance* mengacu pada penetapan standar, kelompok lembaga dan para pakar, yaitu diikuti proses pengawasan dan evaluasi serta memeriksa sejauh mana pelaksanaannya memenuhi standar yang telah ditetapkan. Dalam teknik ini, standar mutu yang telah ditetapkan harus dipublikasikan, sehingga dapat diketahui oleh masyarakat, orang tua siswa maupun para pakar.
- (2) *Contract conformance*, yaitu menetapkan standar mutu secara spesifik ini diimplementasikan di sekolah, maka standar mutu harus ditetapkan oleh semua komponen sekolah secara bersama-sama, melalui kesepakatan bersama, dan dituangkan dalam bentuk target. Dengan demikian mutu harus dilihat apakah sesuai dengan komitmen yang tertuang dalam kontrak atau tidak.
- (3) *Customer driven*, yaitu menetaokan mutu didasarkan pada penerima layanan atau produk. Dengan demikian, jika dikaitkan dengan sekolah maka mutu pendidikan harus sesuai dengan harapan penerima layanan pendidikan atau pelanggan pendidikan, baik pelanggan pendidikan internal maupun pelanggan pendidikan eksternal.

5. Peran Komite Sekolah dalam Perspektif mutu Pendidikan

Di depan telah diuraikan bahwa, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sudah berjalan sejak lama. Keikutsertaan itu tidak terlepas dari kesadaran bersama akan pentingnya mutu pendidikan. Secara empiris menunjukkan bahwa, keterlibatan masyarakat dan

orang tua siswa sangat membantu peningkatan mutu pendidikan. Departemen pendidikan nasional telah melakukan analisis dan kajian mengapa mutu pendidikan di Indonesia masih rendah. Hasilnya ada tiga factor yang menjadi penyebab. Factor pertama, pengelolaan pendidikan nasional dilakukan secara *birokratik-sentralistik*, dimana pusat sangat dominan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan, sedangkan daerah dan sekolah lebih berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pusat, dengan kata lain sekolah tidak memiliki otonomi. Factor kedua, kebijakan pendidikan yang menggunakan pendekatan input-output analisis yang tidak dilaksanakan secara konsekwen. Pendekatan ini menganggap bahwa, apabila input pendidikan seperti pelatihan guru, pengadaan buku pelajaran, dan perbaikan sarana prasarana pendidikan dipenuhi mutu pendidikan akan meningkat. Faktor ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan sangat minim. Pendapat yang hamper sama juga dikemukakan oleh suryadi bahwa, kekuasaan birokrasi yang bersifat sentralistik menyebabkan partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan menurun.

Bertitik tolak dari kesadaran akan pentingnya peran orang tua siswa dan masyarakat dalam peningkatan mutu pendidikan, pemerintah melalui departemen pendidikan nasional mengambil kebijakan untuk mewadahi partisipasi orang tua siswa dan masyarakat dalam suatu wadah yang disebut komite sekolah (Surat Keputusan Mendiknas Nomor 044 Tahun 2002 Tentang Dewan Pendidikan Dan Komite Sekolah, Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang System Pendidikan Nasional). Melalui komite sekolah, diharapkan orang tua dan

masyarakat peduli terhadap mutu pendidikan dengan melalui beberapa peran yang diwujudkan dalam aktivitas-aktivitas untuk membantu peningkatan mutu pendidikan disekolah. Dengan kata lain, komite sekolah diharapkn lebih difokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Dengan kata lain, komite sekolah di harapkan lebih di fokuskan terhadap peningkatan mutu pendidikan. Dengan demikian, keberadaan komite sekolah sangat erat kaitannya dengan peningkatan mutu disekolah.³⁹



³⁹ Winoto, suhadi, *Manajemen berbasis sekolah*,(Jember:Pena Salsabila 2011), 129